

Pengabdian masyarakat sebagai proses pembentukan kematangan profesional berbasis pilar ulul albab

Rendhi Fatrisna Yuniar¹, Muhammad Ghifarin Azzam², Alyani Syahira³, Rena Al'rizki Perdana⁴, Wahyu Adi Nugroho⁵, Kandita Deswira Hardanti⁶, Muhammad Rizki Fajar⁷, Dinda Silvy Faradila⁸, Muh Rizki Maulana Zulfan⁹, Syafana Aisyah Zhalikha¹⁰, Pandu Agung Sakti¹¹, Rizwatul Fachriyah¹², Nazwa Primayditha¹³, Salsabila Nur Fadhilah¹⁴, Ahmad Rofih¹⁵

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kkmkalisrikalipare67@gmail.com

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Mahasiswa, Ulul Albab, SDGs, Pemberdayaan Desa.

Keywords:

Community Service, Student Fieldwork, Ulul Albab, SDGs, Village Empowerment. values

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang bertujuan menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif KKM dan realitas permasalahan sosial masyarakat desa yang kompleks, seperti stunting, lemahnya pola asuh anak (parenting), kemiskinan ekstrem, rendahnya literasi teknologi, serta tantangan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi pilar Ulul Albab dan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dijadikan basis pelaksanaan KKM di Desa Kaliasri guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai dzikir, fikir, dan amal shalih dalam kerangka SDGs mampu memperkuat kesadaran kritis mahasiswa dan masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif warga desa, serta mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap program KKM. Pendekatan partisipatif yang disertai pendampingan jangka panjang terbukti lebih efektif dalam membangun kapasitas sumber daya manusia desa dibandingkan intervensi yang bersifat sesaat dan seremonial. Dengan demikian, pengabdian masyarakat berbasis Ulul Albab tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian persoalan sosial desa, tetapi juga berperan strategis dalam membentuk kematangan profesional mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang beretika, reflektif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

ABSTRACT

Community service through the Student Work Lecture (KKM) is an integral part of the implementation of the Tri Dharma of higher education, which aims to bridge academic knowledge with the real needs of society. This condition indicates a gap between the normative objectives of KKM and the reality of complex social problems in rural communities, such as stunting, weak parenting patterns, extreme poverty, low technological literacy, and the challenge of strengthening religious moderation. This study aims to analyze how the integration of the Ulul Albab pillars and the Sustainable Development Goals (SDGs) framework can be used as a basis for KKM implementation in Kaliasri Village to encourage sustainable social change. This study uses a qualitative approach with the Participatory Action Research (PAR) method. The results show that the integration of the values of dhikr, fikir, and good deeds within the SDGs framework can strengthen critical awareness among students and the community, increase active participation of villagers, and encourage a growing sense of ownership of the KKM program. A participatory approach accompanied by long-term mentoring has proven more effective in building the capacity of village human resources than short-term and ceremonial interventions. Thus, Ulul Albab-



based community service not only contributes to resolving village social issues but also plays a strategic role in shaping students' professional maturity as ethical, reflective, and sustainability-oriented agents of social change.

Pendahuluan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menghubungkan aktivitas akademik dengan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana mandat Tri Dharma perguruan tinggi. Walaupun demikian, praktik KKM sering kali masih bersifat normatif administratif tanpa arah nilai yang jelas dan kurang terintegrasi dengan arah pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Di sisi lain, paradigma *Ulul Albab* sebagai konsep pendidikan Islam menonjolkan keseimbangan antara dimensi spiritual (*dzikir*), kognitif (*fikir*), dan implementatif (*amal shalih*), yang berpotensi menjadi landasan nilai dalam program pengabdian masyarakat seperti KKM. Kajian *Ulul Albab* menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tersebut mampu memperkuat karakter individu yang holistik, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berdaya moral dan sosial dalam kehidupan nyata (Paul Tan Istandar, 2022).

Sementara itu, agenda pembangunan global melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai arah pembangunan dunia hingga tahun 2030. SDGs dirancang sebagai *blueprint* pembangunan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Nation, 2015) Dalam konteks desa, SDGs menjadi acuan penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Mahasiswa melalui program pengabdian seperti KKM diposisikan sebagai aktor strategis dalam menjembatani pengetahuan akademik dengan realitas pembangunan desa. Keterlibatan ini memungkinkan isu-isu seperti kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan ditangani secara terpadu dan berkelanjutan (Miladiah, 2025).

Meskipun program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang berfokus pada isu *stunting*, *parenting*, *kemiskinan ekstrem*, dan *moderasi beragama* mulai dijalankan di beberapa desa di Indonesia, tantangan implementasi yang menghasilkan dampak jangka panjang masih signifikan dan nyata. Data dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan pada tahun 2024 angka *stunting* di Indonesia turun menjadi 19,8% yang mana angka tersebut turun signifikan dalam 10 tahun terakhir. (Muharwan, 2025) Demikian pula dalam konteks *parenting* Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 4,58 % balita di Indonesia pernah mengalami pengasuhan tidak layak, terutama di wilayah pedesaan, yaitu kondisi ketika anak ditinggal tanpa pengawasan orang dewasa atau diasuh oleh anak di bawah usia 10 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa jutaan anak masih berada dalam situasi pengasuhan yang tidak aman dan tidak responsif, yang berpotensi menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. (A, 2025) Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman dan praktik pola asuh di tingkat keluarga, sehingga intervensi *parenting*

yang bersifat edukatif dan berkelanjutan masih menjadi kebutuhan mendesak dalam program pembangunan sosial di desa (Soleh et al., n.d.).

Sementara itu, Menurut rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juli 2025 berdasarkan *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025*, tingkat kemiskinan nasional di Indonesia tercatat 8,47 % dan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 23,85 juta orang, dengan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi yaitu 11,03 % dibandingkan perkotaan (6,73 %). Dalam laporan yang sama, BPS juga melaporkan bahwa kemiskinan ekstrem yang diukur sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,85 % atau sekitar 2,38 juta orang, menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, kemiskinan ekstrem masih terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah perdesaan dan daerah prioritas pembangunan. (Badan Pusat Statistik, 2025) Angka-angka ini mencerminkan bahwa keberadaan program pemberdayaan ekonomi yang bersifat sementara atau skala kecil selama KKN sering belum memadai untuk mengangkat kesejahteraan secara berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Dampak jangka panjang dari kemiskinan ekstrem pada kualitas hidup masyarakat juga berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktif, yang menuntut intervensi berbasis nilai dan konteks lokal untuk menghasilkan perubahan nyata secara berkelanjutan (Sumbulah, 2013).

Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa meskipun KKM telah diarahkan untuk mendukung isu strategis seperti stunting, parenting, kemiskinan ekstrem, dan moderasi beragama, implementasinya masih cenderung bersifat jangka pendek dan belum menghasilkan dampak berkelanjutan di tingkat desa. Penurunan angka stunting nasional menjadi 19,8 % pada 2024, masih tingginya pengasuhan tidak layak sebesar 4,58 % balita, serta keberadaan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem pada 2025 menegaskan bahwa persoalan sosial di desa tidak cukup diatasi melalui program intervensi temporer semata. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif KKM berbasis SDGs dengan realitas sosial masyarakat desa, terutama ketika program tidak berlandaskan nilai yang mampu mendorong kesadaran, analisis kritis, aksi nyata, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, integrasi empat pilar Ulul Albab menjadi penting sebagai basis nilai untuk memastikan KKM tidak berhenti pada pemenuhan indikator kegiatan, tetapi berkontribusi pada transformasi sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan riset: bagaimana integrasi pilar Ulul Albab dan SDGs dapat dijadikan basis pelaksanaan KKM di Desa Kaliasri agar mampu menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan dalam penanganan stunting, parenting, kemiskinan ekstrem, dan penguatan moderasi beragama?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *Participatory Action Research (PAR)* karena tidak hanya bertujuan memahami fenomena sosial, tetapi juga

mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa KKM dan masyarakat Desa Kaliasri sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. PAR relevan dengan integrasi pilar Ulul Albab, yaitu dzikir, fikir, dan amal shalih, yang tercermin dalam kesadaran nilai, analisis kritis, dan aksi nyata dalam pengabdian masyarakat. Selain itu, PAR sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pembangunan partisipatif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan KKM tidak hanya berfokus pada pemenuhan kegiatan administratif, tetapi diarahkan pada transformasi sosial yang berkelanjutan di tingkat desa.

Kajian literatur

Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Mahasiswa

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar utama Tri Dharma perguruan tinggi yang berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan dan nilai dari dunia akademik ke masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan pengabdian tersebut secara langsung di tingkat desa. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan KKM sering kali masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban akademik dan capaian administratif, sehingga kurang memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Keterbatasan durasi, lemahnya pendampingan pascaprogram, serta minimnya integrasi nilai menjadi faktor yang menyebabkan program KKM belum optimal dalam mendorong transformasi sosial masyarakat desa.

Paradigma Ulul Albab dalam Pendidikan dan Pengabdian

Konsep Ulul Albab dalam pendidikan Islam menekankan integrasi antara dimensi spiritual (dzikir), intelektual (fikir), dan praksis sosial (amal shalih). Paradigma ini memandang manusia sebagai subjek pembelajar yang utuh, tidak hanya unggul secara kognitif tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pengabdian masyarakat, nilai Ulul Albab relevan untuk membentuk karakter mahasiswa yang reflektif, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Internalitas nilai dzikir mendorong etika dan integritas, fikir menumbuhkan kemampuan analisis kontekstual terhadap persoalan sosial, sementara amal shalih memastikan bahwa pengetahuan akademik diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat.

Sustainable Development Goals dan Pembangunan Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kerangka global pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, SDGs berfungsi sebagai acuan dalam penanganan isu-isu strategis seperti kemiskinan,

kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan. Perguruan tinggi, melalui program KKM, memiliki peran strategis dalam mengontekstualisasikan SDGs ke dalam program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal. Namun, tanpa pendekatan partisipatif dan pendampingan jangka panjang, implementasi SDGs di tingkat desa berpotensi bersifat simbolik dan kurang berdampak.

Participatory Action Research sebagai Pendekatan Pemberdayaan

Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan penelitian yang mengintegrasikan proses riset dengan aksi sosial secara partisipatif. PAR menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan objek intervensi, sehingga relevan dengan prinsip pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses refleksi kritis, pembelajaran kolektif, dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks KKM, PAR sejalan dengan paradigma Ulul Albab karena menggabungkan kesadaran nilai, analisis kritis, dan tindakan nyata. Berbagai studi menunjukkan bahwa program pengabdian berbasis PAR lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, membangun rasa kepemilikan, serta menciptakan dampak jangka panjang dibandingkan pendekatan top-down.

Penguatan Human Capital dan Literasi Teknologi Desa

Teori human capital menekankan pentingnya investasi pada pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi. Di wilayah pedesaan, rendahnya literasi teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang dikaitkan dengan kebutuhan nyata masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan layanan publik desa, mampu meningkatkan partisipasi dan adopsi teknologi secara signifikan. Oleh karena itu, integrasi penguatan human capital, literasi teknologi, dan nilai-nilai Ulul Albab dalam program KKM menjadi strategi penting untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Dan Problematika Dalam Pembangunan Sumber Daya Masyarakat

Pembangunan desa dalam kajian *human capital* menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Teori *human capital* menyatakan bahwa investasi pada pendidikan, pelatihan, dan keterampilan merupakan modal yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan kesejahteraan kolektif masyarakat desa. Becker menjelaskan bahwa manusia bukan sekedar sumber daya, tetapi merupakan modal yang mampu menciptakan nilai tambah melalui peningkatan kapasitas keterampilan dan pengetahuan (Arifin, 2023). Dalam konteks desa, penguatan *human capital* menjadi prasyarat penting bagi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Tanpa peningkatan kualitas SDM yang

berkelanjutan, berbagai potensi desa sulit dikembangkan secara optimal dan berdaya saing.

Rendahnya kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya literasi teknologi merupakan permasalahan struktural dalam proses pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan cenderung bersifat administratif dan belum berorientasi pada peningkatan kapasitas individu. Kehadiran warga dalam pelatihan sering kali dipicu oleh kewajiban formal atau insentif ekonomi yang bersifat sesaat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai pembangunan berbasis kemandirian dan pembelajaran berkelanjutan. Akibatnya, program pelatihan tidak mampu menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi yang signifikan. Menurut Prastiwi, Nailur Rohmah & Damar (2025), rendahnya literasi digital di masyarakat pedesaan menghadirkan hambatan struktural bagi pemberdayaan karena membatasi akses terhadap peluang pendidikan, layanan dan informasi penting, sehingga masyarakat belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pembangunan mereka (Putri et al., 2025)

Permasalahan literasi teknologi juga berkaitan erat dengan pendekatan pelatihan yang kurang kontekstual dan partisipatif. Materi pelatihan umumnya disampaikan secara teoritis tanpa dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa teknologi merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak relevan dengan aktivitas sehari-hari. Padahal, teknologi digital memiliki potensi besar untuk mendukung sektor ekonomi lokal, khususnya UMKM dan promosi desa. Ketidaksihesuaian metode pelatihan ini memperkuat resistensi masyarakat terhadap inovasi teknologi (Rachmatsyah, 2025). Minimnya praktik langsung serta tidak adanya pendampingan berkelanjutan menyebabkan masyarakat kesulitan menginternalisasi manfaat teknologi dalam konteks kehidupan mereka. Akibatnya, teknologi dipandang sebagai beban tambahan, bukan sebagai alat pemberdayaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan materi, tetapi juga oleh kesesuaian metode, konteks lokal, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembelajaran.

Dalam upaya peningkatan literasi teknologi desa membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan. Pendampingan jangka panjang dinilai lebih efektif dibandingkan pelatihan sesaat yang bersifat seremonial. Ketika manfaat teknologi dirasakan secara langsung dalam kehidupan ekonomi dan sosial, tingkat adopsi masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, penguatan SDM desa harus diarahkan pada perubahan pola pikir kolektif dan budaya belajar.

Pada konteks pembangunan masyarakat digital, partisipasi aktif warga menjadi elemen kunci dalam memastikan teknologi tidak hanya dikuasai oleh segelintir kelompok. Keterlibatan masyarakat dalam platform digital baik untuk tujuan sosial, politik, pendidikan, maupun budaya mendorong terbentuknya ruang publik baru yang lebih inklusif dan transparan. Melalui demokrasi digital, warga memiliki kesempatan lebih luas untuk menyuarakan aspirasi, mengawasi kebijakan, serta berperan langsung

dalam proses pengambilan keputusan secara daring. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial di era digital. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana penguatan relasi antara warga dan institusi, bukan sekadar alat komunikasi pasif.

Pada saat yang sama, inovasi sosial berbasis teknologi menjadi strategi penting dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Pemanfaatan teknologi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan memungkinkan solusi yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Inisiatif digital seperti platform pembelajaran daring, layanan kesehatan berbasis aplikasi, hingga sistem pelaporan lingkungan menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inovasi semacam ini mendorong kolaborasi antara warga, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan dampak sosial yang nyata (Budiman, 2025). Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus diarahkan tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kapasitas inovatif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bersama.

Solusi Problematika Dan Dinamika

Solusi utama dalam mengatasi rendahnya literasi teknologi desa adalah penerapan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif. Pendekatan ini berangkat dari argumen bahwa keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program literasi digital. Secara rasional, masyarakat yang dilibatkan sebagai subjek pembangunan cenderung memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil program. Bukti empiris menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas mampu meningkatkan adopsi teknologi di wilayah pedesaan secara signifikan. World Bank mencatat bahwa model *community-driven development* mempercepat peningkatan kapasitas digital masyarakat rural. Temuan ini menegaskan bahwa partisipasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan faktor penentu keberhasilan pembangunan SDM. Dengan demikian, pendekatan partisipatif menjadi solusi strategis dalam memperkuat *human capital* desa.

Solusi berikutnya adalah penguatan pendampingan jangka panjang melalui fasilitator atau kader digital desa. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa pelatihan sesaat tidak cukup membentuk kompetensi dan perubahan perilaku masyarakat. Secara konseptual, pendampingan berkelanjutan memungkinkan proses belajar yang adaptif sesuai dengan tingkat kesiapan warga desa. Bukti menunjukkan bahwa keberadaan pendamping lokal mampu menurunkan resistensi terhadap teknologi dan meningkatkan keberlanjutan program digital. Kementerian Desa menegaskan bahwa transformasi digital desa membutuhkan pendampingan SDM yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Pendamping lokal juga berperan sebagai penghubung antara teknologi dan konteks sosial budaya desa (Damayanti et al., 2023). Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan menjadi solusi kunci dalam mengatasi kegagalan pelatihan teknologi yang bersifat seremonial.

Solusi lainnya adalah mengintegrasikan literasi teknologi dengan pengembangan ekonomi lokal desa. Argumen ini menekankan bahwa teknologi akan lebih mudah diterima ketika memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Secara logis, keterkaitan antara teknologi dan peningkatan pendapatan mendorong motivasi belajar yang lebih tinggi. Bukti empiris menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM desa mampu meningkatkan akses pasar dan daya saing produk lokal. OECD menyatakan bahwa integrasi literasi digital dengan ekonomi lokal mempercepat inklusi digital di wilayah pedesaan. Ketika teknologi dimaknai sebagai alat produktivitas, persepsi masyarakat terhadap kompleksitas teknologi akan berkurang (Azizah et al., 2025). Dengan demikian, integrasi ekonomi dan teknologi menjadi solusi efektif dalam meningkatkan literasi digital desa.

Solusi jangka panjang memerlukan penguatan ekosistem masyarakat digital melalui inovasi sosial dan demokrasi digital desa. Argumen ini berangkat dari kebutuhan menciptakan ruang partisipasi digital yang inklusif dan transparan. Secara teoritis, demokrasi digital memperluas keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Bukti menunjukkan bahwa platform digital aspirasi warga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap institusi desa. UNDP menegaskan bahwa inovasi sosial berbasis teknologi berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan komunitas lokal. Inovasi ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah, dan swasta (Irsyad et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan ekosistem digital menjadi solusi struktural dalam membangun masyarakat desa yang adaptif dan berdaya saing.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di tingkat desa masih menghadapi tantangan mendasar, terutama kecenderungan program yang bersifat administratif, jangka pendek, dan belum menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan. Berbagai persoalan strategis seperti stunting, lemahnya praktik parenting, kemiskinan ekstrem, serta rendahnya literasi teknologi menunjukkan bahwa intervensi pembangunan desa tidak cukup dilakukan melalui kegiatan temporer tanpa basis nilai dan pendekatan yang kontekstual. Data empiris yang menunjukkan masih tingginya angka stunting, pengasuhan tidak layak, dan kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan mempertegas adanya kesenjangan antara tujuan normatif KKM berbasis SDGs dengan realitas sosial masyarakat desa.

Integrasi paradigma Ulul Albab yang menekankan keseimbangan antara dzikir, fikir, dan amal shalih menawarkan landasan nilai yang relevan untuk memperkuat orientasi KKM agar tidak berhenti pada pencapaian output kegiatan, tetapi mampu mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Nilai kesadaran spiritual membentuk etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa, kemampuan berpikir kritis mendorong analisis kontekstual terhadap permasalahan desa, sementara orientasi amal shalih memastikan bahwa pengetahuan akademik diwujudkan dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika paradigma ini disinergikan dengan kerangka

Sustainable Development Goals (SDGs), KKM berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan global dengan kebutuhan lokal desa.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) terbukti relevan sebagai metode pelaksanaan KKM karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan, peningkatan literasi teknologi desa dapat diarahkan pada penguatan human capital, perubahan perilaku, serta tumbuhnya budaya belajar kolektif. Integrasi literasi teknologi dengan pengembangan ekonomi lokal, khususnya UMKM desa, memperkuat motivasi masyarakat untuk mengadopsi teknologi karena manfaatnya dirasakan secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, penguatan ekosistem digital desa melalui inovasi sosial dan demokrasi digital membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel dalam kehidupan sosial dan pemerintahan desa.

Dengan demikian, integrasi pilar Ulul Albab dan SDGs sebagai basis pelaksanaan KKM di Desa Kaliasri tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga strategis dalam menjawab persoalan pembangunan sosial secara berkelanjutan. KKM yang berlandaskan nilai, partisipatif, dan kontekstual berpotensi menjadi motor transformasi sosial desa, sekaligus memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang berkontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A, S. (2025). *4% Balita Indonesia Pernah Dapat Pengasuhan Tak Layak*. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/4-balita-indonesia-pernah-dapat-pengasuhan-tak-layak-FCPTJ>
- Arifin, A. S. (2023). HUMAN CAPITAL INVESTMENT : MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL MELALUI INVESTASI PENDIDIKAN. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 174–179. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4672>
- Azizah, N., Studi, P., Bisnis, A., Oleo, U. H., Studi, P., Negara, A., & Oleo, U. H. (2025). SMART-UMKM : MENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN KAPASITAS MANAJERIAL TEKNOLOGI UNTUK UMKM DESA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ABDIMAS*, 5(379), 379–386. <https://doi.org/10.52622/mejuajuajabdimas.v5i2.300>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun*. BPS -Statistic Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>
- Budiman. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Informasi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JP-Mas)*, 6(2), 48–58.
- Damayanti, W., Firdaus, A. I., Utami, D. W., Nurhayati, S., Panjawa, J. L., & Tidar, U. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat desa magersari mengenai era globalisasi melalui literasi digital. *Journal of Community Service in Public Education*, 3(2), 80–90. <https://doi.org/10.31002/cspe.v3i2.1076>
- Irsyad, Trisiana, A., & Wartoyo. (2025). Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mlese Melalui Implementasi Aplikasi Smart Village Sebagai Pendukung Literasi

- Digital Desa Pelopor Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 2–12. <https://doi.org/10.33061/jgz.v14i2.12294>
- Miladiah, Vida Rofika. (2025). *Konstruksi Sosial dan Living Qur'an Dalam Tradisi Pegon Masyarakat Ambulu Kabupaten Jember*. 22(2).
- Muharwan, A. (2025). *Pertama Kali dalam Sejarah: Prevalensi Stunting di Indonesia Turun di Bawah 20 persen*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/eng/pertama-kali-dalam-sejarah-prevalensi-stunting-indonesia-turun-di-bawah-20-persen>
- Nation, U. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Paul Tan Istandar. (2022). Menyelaraskan Pendidikan Akademis dan Moral Dalam Membangun Masyarakat Berkarakter Unggul. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 1(1), 71–83. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v1i1.881>
- Putri, T., Jihan, P., Rohmah, N., & Damar, D. (2025). The Role of Digital Literacy in Empowering Rural Communities. *Jurnal Empowering Communities Research Hub*, 1(1), 11–18.
- Rachmatsyah, T. H. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi untuk Optimalisasi UMKM sebagai Pilar Utama Ekonomi Indonesia. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 8(1), 164–173.
- Soleh, D. A. K., Ag, M., Rahmawati, E. S., & Ag, M. (n.d.). *KERJASAMA UMAT BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN*.
- Sumbulah, U. (2013). *KONVERSI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA*: